



Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir Di Provinsi Bengkulu

Anzori Tawakal · Asa'd Hasan

Abstract. As one of the coastal areas, Bengkulu Province has very potential natural wealth. Even so, the development has not run optimally, where the level of community welfare is still low and development is still lagging behind. This study aims to identify the strategy for developing coastal areas in Bengkulu Province using SWOT analysis. The results of the study found that the strategy for developing the coastal region of Bengkulu province could be done using an aggressive strategy, which illustrates that the situation is very good because there are forces that are utilized to seize profitable opportunities, to overcome various weaknesses and threats. The development strategy of the coastal region of Bengkulu province can be done by optimally utilizing coastal and marine natural resources to be carried out to meet the broad share of the share of domestic and foreign fishery products, enforce existing legislation to increase the level of domestic fish consumption, acceleration of government policies to accelerate the development of marine and fisheries in order to provide raw materials for processed and fishery products, strengthen permanent government institutions to meet the demand for processed marine and fishery products, increase the allocation of funds managed by the government to increase product competitiveness and prices of marine products , increasing the development of infrastructure/facilities, advances in marine and fisheries technology in developing maritime tourism and tourism as well as increasing foreign and domestic investment.

Keywords : Wilayah Pesisir, SWOT Analisis, Provinsi Bengkulu

©2018 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

1. Pendahuluan

Wilayah pesisir merupakan bagian sumber daya alam yang dianugerahkan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan perlu dijaga kelestariannya baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang (UUD 1945 Pasal 33).

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, mencakup pemanfaatan dan penguasaan sumber daya pesisir. Pemanfaatan sumber daya pesisir meliputi sumber

Anzori Tawakal (✉)
Pemda Provinsi Bengkulu
Email : anzoritawakal@gmail.com

As'ad Hasan (✉)
Fakultas Ekonomi Univ. Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
Email : asadamirhasan@yahoo.co.id

daya alam hayati dan bukan hayati, jasa lingkungan pesisir, sumber daya binaan atau buatan, dalam hal penguasaan sumber daya wilayah pesisir, harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, hak ulayat dan masyarakat adat, hak pengelolaan perairan, berdasarkan kebiasaan serta hukum adat setempat (Laynurak, 2008). Javier (2015) menyebutkan isu-isu pesisir dan kelautan harus ditangani melalui inisiatif *transversal*, yaitu dari keseluruhan dan mencakup segala visi masalah, menurut penyebabnya, dan bukan hanya gejala yang bersifat sementara. Hoagland *et al.* (2013) menyebutkan keputusan tentang pembangunan wilayah pesisir harus berdasarkan analisis ekonomi, tetapi mereka juga harus memperhatikan isu-isu keadilan untuk pengguna yang ada dan nilai kemungkinan sumber daya untuk generasi mendatang, pertimbangan lebih lanjut harus diperhatikan dampak degradasi habitat sumber daya wilayah pesisir. Menurut Basurto *et al.* (2013) strategi paling umum digunakan pemerintah adalah menumbuhkan koperasi dan hubungan patron-klien dalam mengelola perikanan skala kecil hampir di seluruh dunia.

Schernewski *et al.* (2014) menyebutkan Dewan Eropa pada tahun 2006 mengadopsi *Integrated Coastal Zone Marine (ICZM)* mengenai strategi pembangunan berkelanjutan. Visi berkelanjutan yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan yang terintegrasi serta kebutuhan generasi sekarang terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dewan Eropa mengadopsi rekomendasi zona manajemen pesisir terpadu *Integrated Coastal Zone Marine (ICZM)*, yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan wilayah pesisir. Prinsip-prinsip panduan untuk berkelanjutan menyebutkan hubungan antara tindakan lokal, regional, nasional, global dan *review* dari *development management* strategi berkelanjutan di mana manajemen terpadu zona pesisir memerlukan strategi terpadu di tingkat lokal dan regional, dengan demikian kabupaten/kota pesisir memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan, untuk mengukur keberlanjutan usaha mereka saat ini sudah menjadi tugas utama bagi pemerintah.

Pada era pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun 2014-2019, salah satu program prioritasnya adalah pembangunan poros maritim. Salah satu sektor yang termasuk didalamnya adalah sektor kelautan perikanan. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan difokuskan untuk membangun infrastruktur sarana prasarana, peningkatan daya saing produk kelautan perikanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

Saat ini kontribusi sektor maritim dalam perekonomian nasional terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data kementerian kelautan dan perikanan, produksi sektor perikanan pada tahun 2007 sebesar 8.028 juta ton dan naik menjadi 19,56 juta ton di tahun 2013, memberikan sumbangan devisa sebesar US \$ 4.16 milyar atau 6.45 % terhadap perekonomian nasional. Sektor perikanan dan kelautan juga telah menyerap 1700 tenaga kerja terdidik dan 6000 tenaga kerja terlatih (Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014). Namunpun demikian, sektor maritime masih perlu banyak pembenahan, karena sampai saat ini, wilayah pesisir cenderung memiliki tingkat kemiskinan tinggi yang merefleksikan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan (Laynurak, 2008).

Olomola (1993) bahwa pengelolaan perikanan tradisional di bawah rezim milik bersama melalui strategi manajemen yang efektif dan alternatif seperti privatisasi dan kontrol publik yang sering direkomendasikan dalam literatur adalah salah satu prioritas



untuk mengatasi masalah yang dihadapi nelayan di Nigeria. Aheto *et al.* (2012) menyarankan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya perikanan, umumnya tidak memberikan peningkatan terhadap ekonomi dalam peningkatan investasi jangka panjang. Ini adalah indikator yang jelas bahwa mengelola sumber daya perikanan secara terbuka di Ghana tidak berkelanjutan, dan terlambatnya reformasi manajemen yang baik.

Kebijakan pemerintah merupakan faktor yang sangat penting dalam mengelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab, melalui penentuan pilihan mata pencaharian, reaksi dan strategi, dan hasil akhir dalam hal kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya perikanan dan kemauan untuk berinvestasi dalam membantu melestarikan basis sumber daya alam (Jentoft *et al.*, 2010). Kishor (2014) menyebutkan di India, dampak dari program pemberdayaan nelayan besar adalah bahwa adanya kredit mikro melalui *sangam* (istilah pertemuan sungai) sekarang menjadi alat penting untuk memerangi kemiskinan di wilayah pesisir. Pemerintah dan *Non-Governmental Organizations* bekerja secara ekstensif di bidang ini. Kredit saja tidak bermanfaat apabila tanpa dikemas dengan program pelatihan, kesadaran menghabiskan sumber daya perikanan, pemasaran, sarana transportasi, teknologi, pendidikan dan lain-lain. Dengan strategi dukungan pasar yang tepat anggota secara efektif bisa membangun organisasi sebagai sumber lapangan kerja dan pendapatan mereka. Oleh karena itu, pelatihan untuk para pemimpin potensial harus disampaikan dengan fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, dinamika kelompok dan konflik kelompok. Kemudian program ini hanya bisa membuat keberhasilan dalam jangka panjang. Memberdayakan nelayan tradisional berarti tidak hanya pemberian harapan untuk masa depan nelayan tradisional tetapi juga untuk dunia pada umumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), keterampilan (*skill*) sumber daya manusia nelayan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan.

Perbaikan yang signifikan dalam prospek perikanan akan memerlukan perubahan besar dalam prioritas sosial dan perbaikan nilai-nilai, sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pembangunan dan ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan totalitas, tetapi masih ada kebutuhan untuk manajemen lintas sektoral yang membangun ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap kekuatan-kekuatan di luar pengaruh nelayan skala kecil (Andrew *et al.*, 2015). Alison *et al.* (2001) menjelaskan penerapan strategi nelayan berhadapan dengan fluktuasi sumber daya perikanan, memerlukan wawasan yang luas dalam kebijakan pengelolaan perikanan konvensional dan manajemen yang baik untuk mengeksplorasi sumber daya perikanan di negara berkembang.

Penelitian Dirhamsyah (2008) menyebutkan *Community-Based Fisheries Management* (CBFM) dan *co-manajemen* adalah pilihan yang lebih disukai untuk pengelolaan perikanan karena mereka melibatkan nelayan yang paling berpengaruh, sehingga mendorong ide membuat mereka bertanggung jawab untuk masa depan mereka. Penelitian Raemaekers *et al.* (2006) menyatakan bahwa upaya pengelolaan pesisir di Afrika Selatan telah mengalami transformasi dramatis dalam dekade terakhir. Dari fokus birokrasi dan biofisik terhadap pendekatan yang berdasarkan pada partisipasi, pemberdayaan dan promosi penghidupan pesisir yang berkelanjutan. Kemiskinan yang dihadapi adalah bisa dikatakan isu yang paling penting dan menantang bagi Pemerintah Afrika Selatan. Barang dan jasa yang berasal dari pantai Afrika Selatan memiliki kontribusi penting untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Afrika Selatan di banyak sektor



berupaya untuk memanfaatkan penghidupan berkelanjutan, melalui pendekatan untuk mendorong lebih *people centered, pro-poor*, pengelolaan pesisir terpadu. Pendekatan kehidupan berkelanjutan melengkapi dan memperkaya pengelolaan pesisir terpadu dan dapat membantu untuk menjembatani kesenjangan antara retorika keberlanjutan dan realitas yang dihadapi masyarakat pesisir miskin. Salah satu kekuatan yang jelas lazim di seluruh sektor adalah keanekaragaman alam dan ketahanan negara, baik dari segi warisan alam dan populasi.

Penelitian Sobo *et al.* (2011) perikanan skala kecil di Tanzania mendukung masyarakat pesisir dan berkontribusi terhadap ekonomi negara. Perikanan termasuk dalam sektor prioritas strategi pengurangan kemiskinan nasional, kerangka kerja untuk pengembangan perikanan, kode etik sebagai umpan balik tanggung jawab dan rencana strategis tindakan untuk pengelolaan berkelanjutan sumber daya perikanan. Sektor ini sekarang diberikan prioritas tertinggi dan berada di bawah "kilimo Kwanza" slogan, yang berarti "Pertanian pertama".

Beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas belum ada penelitian wilayah pesisir yang secara spesifik baik secara isu, variabel maupun indikatornya menganalisis secara internal maupun secara eksternal strategi pengembangan wilayah pesisir di provinsi Bengkulu.

Provinsi Bengkulu memiliki panjang pantai \pm 525 km terdiri dari sembilan (9) kabupaten dan satu (1) kota, yaitu Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu yang berhadapan langsung dengan Samudr. Hindia yang memiliki karakteristik wilayah pesisir yang sangat beragam, baik hayati, bukan hayati maupun sumber daya buatan dan sumber daya lingkungan. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka studi ini akan mengkaji Bagaimanakah strategi pengembangan wilayah pesisir di provinsi Bengkulu.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir

Banyak faktor yang menyebabkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan selama ini cenderung belum optimal dan berkelanjutan. Darajati (2004) mengidentifikasi faktor tersebut menjadi faktor internal dan eksternal, dimana secara internal hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pemanfaatan sumber daya, teknologi dan manajemen usaha. Selain itu, pola usaha masyarakat juga masih bersifat tradisional dan subsisten atau hanya cukup memenuhi kehidupan jangka pendek, Modal Usaha terbatas serta masih tingginya kemiskinan dan ketrebalakangan masyarakat nelayan.

Sementara itu, faktor eksternal, meliputi: 1) kebijakan pembangunan pesisir dan lautan yang lebih berorientasi pada produktifitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, bersifat sektoral, parsial dan kurang memihak nelayan tradisional; 2) belum kondusif kebijakan ekonomi makro (*political economy*), suku bunga yang masih tinggi serta belum adanya program kredit lunak yang diperuntukan bagi sektor kelautan; 3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, eksploitasi dan perusakan terumbu karang, serta penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan; 4) sistem hukum dan kelembagaan yang belum memadai disertai implementasinya yang lemah, dan birokrasi



yang beretos kerja rendah serta sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 5) perilaku pengusaha yang hanya memburu keuntungan dengan mempertahankan sistem pemasaran yang mengutungkan pedagang perantara dan pengusaha; 6) rendahnya kesadaran akan arti penting dan nilai strategis pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Menurut Sain (2004) pengelolaan pantai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu meliputi: 1) Keterpaduan antar sektor; sektor laut (perikanan, perlindungan biota laut, pariwisata pantai, pembangunan pelabuhan), dan sektor darat (pertanian). 2) Keterpaduan antara sisi darat dan air dari zona pantai. 3) Keterpaduan antara tingkatan dalam pemerintah (nasional, regional, lokal). 4) Keterpaduan antar negara. 5) Keterpaduan antara berbagai disiplin ilmu (seperti ilmu alam, ilmu sosial dan teknik). Untuk mengimplementasikan Pengelolaan Wilayah Laut Terpadu (PWPLT), Darajati (2004) mengidentifikasi beberapa strategi dasar, yaitu 1) penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam PWPLT; 2) mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam PWPLT; 3) proses perencanaan PWPLT; 4) elemen dan struktur PWPLT; 5) penerapan PWPLT dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.2. Sumber Daya Manusia Pesisir

Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan nasional, oleh karena itu maka kualitas sumber daya manusia senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Berbicara mengenai sumber daya manusia sebenarnya dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kuantitas mencakup jumlah sumber daya manusia yang tersedia / penduduk, sedangkan aspek kualitas mencakup kemampuan sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik/kecerdasan dan mental dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dalam proses pembangunan pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan, sebab kuantitas sumber daya manusia yang besar tanpa didukung kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa.

Rini (2013) menyatakan masyarakat pesisir tergolong menjadi tiga (3) bagian yaitu, masyarakat perairan, masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir tradisional. Pada umumnya masyarakat pesisir Indonesia lekat dengan kesenjangan sosial ekonomi, rata-rata masyarakat pesisir masih hidup pada garis kemiskinan bahkan tidak sedikit yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kehidupan masyarakat pesisir sangat miris, seperti yang kita tahu Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan. Hal itu tidak sebanding lurus dengan realita masyarakat pesisir yang ada.

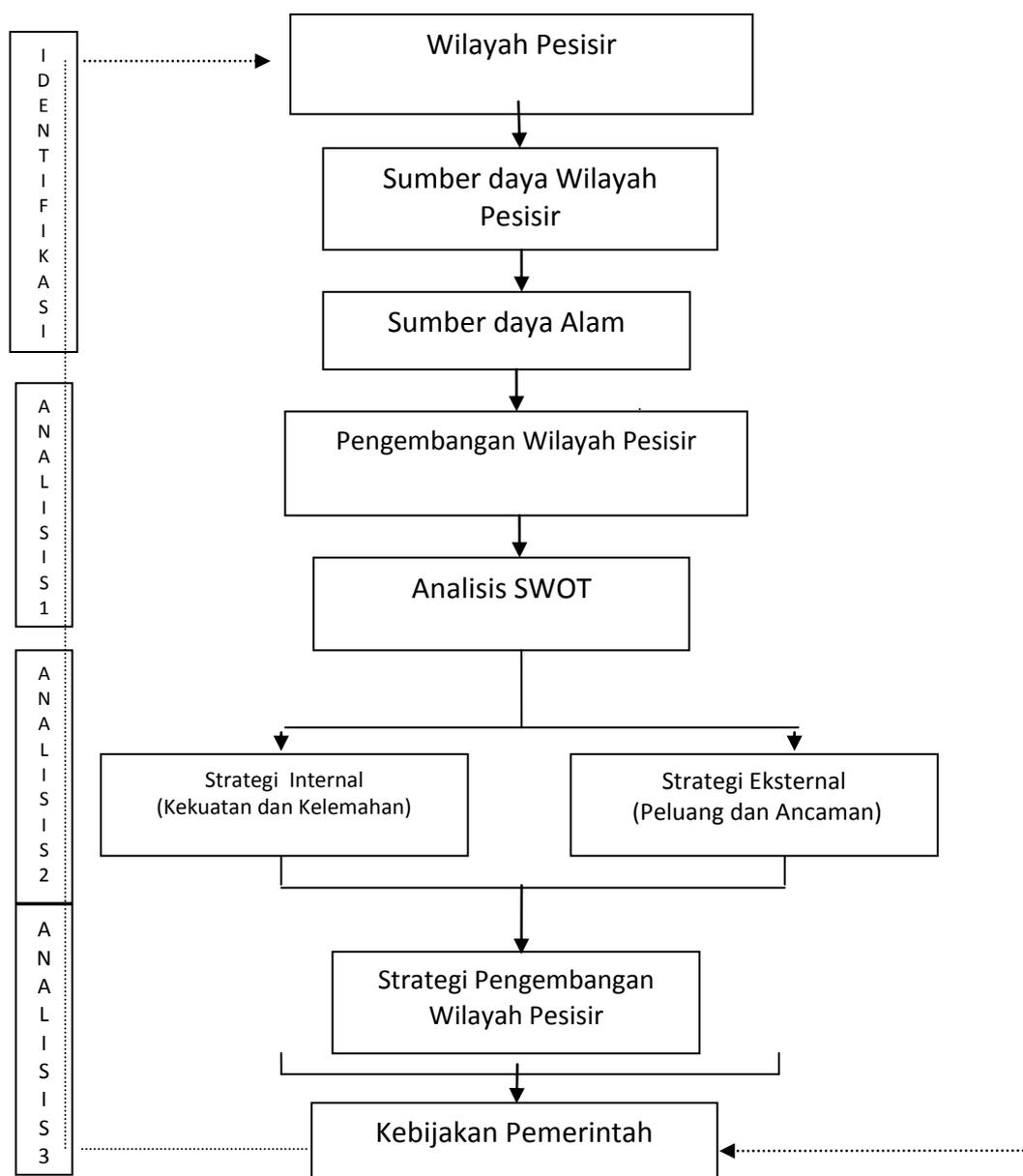
Siregar (2004) menjelaskan ada 3 aset dalam pembangunan berkelanjutan yaitu sumber daya alam, yang meliputi segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk kebutuhan hidup manusia, Sumber daya manusia dengan segala potensinya, dan infrastruktur sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya di masa yang akan datang.

Kusumastanto *et al.* (2012) menjelaskan masyarakat pesisir memiliki karakteristik yang plural (merupakan akulturasi budaya perkotaan dan pedesaan dari berbagai wilayah). Ada beberapa karakteristik masyarakat pesisir: 1) Budaya terbuka; 2) Sumber kehidupannya tergantung pada sumber daya alam; 3) Aktivitas ekonominya sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim; 4) Peran pasar sangat menentukan dalam berkembangnya aktivitas masyarakat.



Charles (2004) mengemukakan bahwa keberlanjutan sistem pesisir di topang beberapa dimensi, yaitu: 1) Dimensi ekologi (*ecological sustainability*) yang mencakup kelestarian sumber daya, kelestarian spesies, serta kelestarian ekosistem; 2) Dimensi sosial ekonomi (*socio-economic sustainability*), yang berarti kelestarian kesejahteraan sosial ekonomi para pelakunya, yang basisnya adalah keberlanjutan keuntungan dan distribusinya kepada seluruh pelaku, serta keberlanjutan sistem sumber daya pesisir, baik di tingkat ekonomi lokal maupun global; 3) Dimensi masyarakat (*community sustainability*) yang berorientasi pada keberlanjutan masyarakat sebagai sebuah sistem, yang di dalamnya mencakup nilai budaya, aturan lokal, pengetahuan, dan kohesifitas; 4) Dimensi kelembagaan (*institutional sustainability*), yakni kesinambungan kapasitas finansial, administrasi, dan organisasi, yang menjaga keberlanjutan tiga dimensi sebelumnya.

Kerangka Penelitian



3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode / teknik analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk menentukan strategi yang paling tepat dalam pengembangan wilayah pesisir. Analisis SWOT digunakan mengingat keunggulan dari alat analisis ini dapat menentukan strategi yang jitu dalam pengambilan keputusan untuk implementasi dari strategi pengembangan.

Analisis SWOT digunakan mengingat keunggulan dari alat analisis ini dapat menentukan strategi yang jitu dalam pengambilan keputusan untuk implementasi dari strategi pengembangan. Soesilo (2002) dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang di anggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Pada tabel matrik SWOT di bawah ini dapat dijelaskan beberapa alternatif strategi, sebagai berikut:

Tabel 1. Matrik SWOT

Internal Eksternal	Strength/Kekuatan : Dituliskan beberapa kekuatan yang dimiliki	Weakness/Kelemahan: Dituliskan beberapa kelemahan yang dimiliki
Opportunity/Peluang: Dituliskan beberapa peluang yang mungkin dihadapi	Strategi SO : Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO : Strategi yang meminimalkan Kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threat/Ancaman: Dituliskan beberapa ancaman yang mungkin dihadapi	Strategi ST: Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi WT: Strategi yang meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti (2014)

Posisi kuadran untuk strategi SWOT dapat di hitung menggunakan kombinasi rating dan bobot, dengan mengumpulkan informasi yang dilakukan melalui kuesioner dengan target adalah sumber daya manusia nelayan yang tinggal di wilayah pesisir, kemudian dilakukan perhitungan pembobotan berdasarkan hasil pengisian kuesioner untuk kemudian dilakukan analisa lebih lanjut. Model yang digunakan untuk menghitung bobot adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2. Tabel Model Bobot SWOT

Kode	Keterangan
SK	Sangat Kurang, jika isu sangat tidak mempengaruhi kondisi saat ini
KR	Kurang, jika isu tidak mempengaruhi kondisi saat ini
CP	Cukup jika isu tidak dapat dijustifikasi saat ini
BA	Baik, jika isu mempengaruhi kondisi saat ini
SB	Sangat Baik, jika sangat mempengaruhi kondisi saat ini

Sumber: Rangkuti (2014)

Karena jumlah bobot harus sama dengan 1 (satu) untuk setiap matriks evaluasi, maka bobot untuk setiap responden tidak mesti sama, tergantung dari banyak jumlah variabel yang dipilih, atau dapat diformulasikan sebagai berikut :



$$A(SB) + B(BA) + C(CP) + D(KR) + E(SK) = 1.00 \dots\dots\dots(3.1)$$

Dimana:

- A = jumlah banyaknya SB dalam satu matrik evaluasi
- B = jumlah banyaknya BA dalam satu matrik evaluasi
- C = jumlah banyaknya CP dalam satu matrik evaluasi
- D = jumlah banyaknya KR dalam satu matrik evaluasi
- E = jmlah banyaknya SK dalam satu matrik evaluasi
- SB = bobot nilai Sangat Baik
- BA = bobot nilai Baik
- CP = bobot nilai Cukup
- KR = bobot nilai Kurang
- SK = bobot nilai Sangat Kurang

Agar lebih mudah maka nilai rasio perbandingan antara SK hingga SB, di buat sama dengan 2, sehingga:

$$SB:BA:CP:KR:SK = 1:2:4:8:16 \dots\dots\dots(3.2)$$

Jika $SB = x$, maka :

$$BA = \frac{1}{2}x \dots\dots\dots(3.2.1)$$

$$CP = \frac{1}{4}x \dots\dots\dots(3.2.2)$$

$$KR = \frac{1}{8}x \dots\dots\dots(3.2.3)$$

$$SK = \frac{1}{16}x \dots\dots\dots(3.2.4)$$

Sehingga:

$$A(x) + B\left(\frac{1}{2}x\right) + C\left(\frac{1}{4}x\right) + D\left(\frac{1}{8}x\right) + E\left(\frac{1}{16}x\right) = 1.00 \dots\dots\dots(3.3)$$

$$x = 16/(16A + 8B + 4C + 2D + E) \dots\dots\dots(3.3.1)$$

$$x = SB \dots\dots\dots(3.3.2)$$

Model yang digunakan untuk menghitung Rating adalah sebagaimana berikut:

Tabel 3. Tabel Model Rating SWOT

Keterangan	Nilai
Isu yang disampaikan tidak urgen	1
Isu yang disampaikan kurang urgen	2
Isu yang disampaikan urgen	3
Isu yang disampaikan sangat urgen	4

Sumber : dari berbagai sumber dan hasil penelitian

Masing-masing responden bebas untuk memasukkan rating sesuai dengan pendapatnya untuk setiap atribut dimensi. Setelah didapatkan nilai bobot dan rating, maka total nilai untuk masing-masing dimensi di hitung berdasarkan formulasi berikut:

$$\text{Nilai(kekuatan-kelemahan)} = \sum (\text{rating}(S_n) \times \text{bobot}(S_n)) + \sum (\text{rating}(W_n) \times \text{bobot}(W_n)) \dots\dots(3.4)$$

$$\text{Nilai(peluang-ancaman)} = \sum (\text{rating}(O_n) \times \text{bobot}(O_n)) + \sum (\text{rating}(T_n) \times \text{bobot}(T_n)) \dots\dots(3.5)$$



4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil pembobotan IFAS dan EFAS Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu

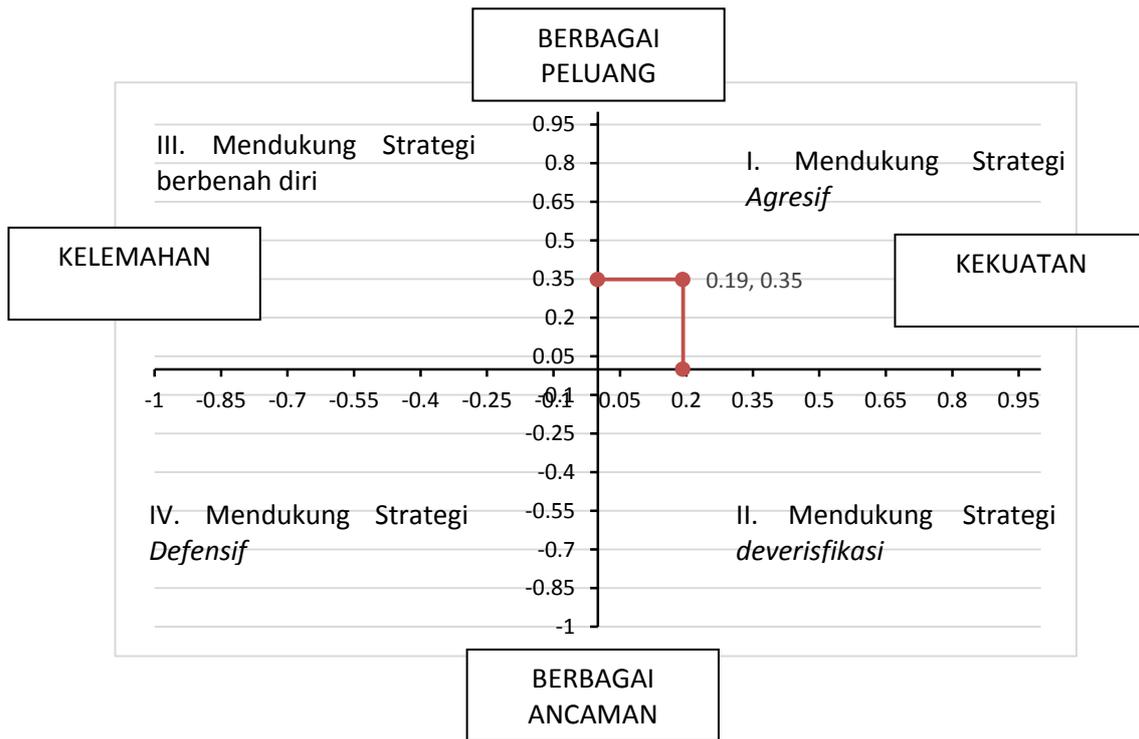
Dari Tabel 4.1. dapat di lihat strategi pengembangan wilayah pesisir provinsi Bengkulu hasil pembobotan IFAS dan EFAS sebagai berikut:

Tabel 4. Pembobotan IFAS dan EFAS

Pengambil kebijakan (pemerintah)	IFAS		EFAS	
	<i>Strenght</i>	<i>Weaknesses</i>	<i>Opportunities</i>	<i>Threath</i>
	3,28	3,09	3,06	2,72
	3,28-3,09 = 0,19		3,06-2,72 = 0,35	

Sumber: hasil pengolahan data penelitian 2015

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa strategi pengembangan wilayah pesisir Bengkulu berada pada kuadran satu (I) pada ordinat 0,19 sumbu *x* dan 0,35 untuk sumbu *y* seperti pada Gambar 4.1. kuadran dibawah ini:



Gambar 2
Kuadran IFAS dan EFAS Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir

Berdasarkan Gambar di atas dapat diketahui posisi berada pada kuadran satu (I) dengan nilai *internal factor analysys strategy* (faktor strategi internal) yaitu 0,19 sedangkan nilai *eksternal factor analysys strategy* (faktor strategi eksternal) yaitu 0,35 hal ini menunjukkan berbagai kelemahan dan ancaman dapat di atasi dengan kekuatan



dan peluang yang dimiliki. Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan langkah – langkah pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*) atau pemerintah melakukan strategi pengembangan wilayah pesisir dengan mengoptimalkan kekuatan internal: 1) kapasitas kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten/Kota; 2) meningkatkan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan provinsi, kabupaten/kota; 3) mengoptimalkan alokasi dana yang di kelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kabupaten/Kota; 4) menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) mengoptimalkan sumber daya manusia terampil; 6) meningkatkan pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 7) memanfaatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sektor kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu dapat dilakukan dengan strategi strength opportunity (SO)

Ada delapan (8) strategi *strength opportunity* (SO) yang dapat dilakukan yaitu:

1. Pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut untuk secara optimal untuk memenuhi luasnya pangsa pasar produk kelautan perikanan di dalam dan luar negeri. Strategi ini dapat dilakukan pemerintah dengan memperkuat kelembagaan pemerintah yang ada, mengalokasikan sumber dana yang memadai dan memanfaatkan sumber daya manusia yang handal dan terampil serta memanfaatkan teknologi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Raemaekers *et al.* (2006) menyatakan bahwa upaya pengelolaan pesisir di Afrika Selatan telah mengalami transformasi dramatis dalam dekade terakhir. Dari fokus birokrasi dan biofisik terhadap pendekatan yang berdasarkan pada partisipasi, pemberdayaan dan promosi penghidupan pesisir yang berkelanjutan. Kemiskinan yang dihadapi adalah bisa dikatakan isu yang paling penting dan menantang bagi pemerintah Afrika Selatan.
2. Menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan di dalam negeri. Strategi ini dapat dilakukan pemerintah dengan upaya menekan atau menurunkan *illegal fishing* dan meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan serta menjaga kualitas produk kelautan perikanan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sundah *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa strategi hukum dan penegakan peraturan yang digunakan untuk memperbaiki lingkungan dan pengelolaan lingkungan, dan untuk meningkatkan pasokan bahan bakar bagi nelayan tradisional.
3. Percepatan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka penyediaan bahan baku produk olahan kelautan perikanan. Strategi ini dapat dilakukan dengan upaya melakukan diversifikasi produk kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi bidang kelautan dan perikanan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mostafaeipour *et al.* (2011) menjelaskan antara lain sebagai berikut: 1) iklan, standar yang baik dan kemasan untuk ekspor; 2) membangun fasilitas pengolahan dan pendinginan oleh investor; 3) menghasilkan ikan salmon untuk ekspor dalam kemasan yang baik; 4)



- memproduksi kepiting dan spesies baru lainnya; 5) mendorong orang untuk mengkonsumsi lebih banyak ikan; 6) memberi perhatian besar terhadap karya-karya penelitian; 7) pemerintah mendukung untuk transportasi, pinjaman, dan subsidi dan; 8) mendorong investor untuk berinvestasi di sektor perikanan.
4. Memantapkan kelembagaan pemerintah yang permanen untuk memenuhi meningkatnya permintaan produk olahan kelautan perikanan. Strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing produk kelautan perikanan dan meningkatkan investasi sektor kelautan perikanan baik investasi pemerintah maupun investasi swasta. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mostafaeipour *et al.* (2011) menjelaskan: 1) membangun fasilitas pengolahan dan pendinginan oleh investor; 2) pemerintah mendukung untuk transportasi, pinjaman, dan subsidi dan; 3) mendorong investor untuk berinvestasi di sektor perikanan.
 5. Meningkatkan alokasi dana yang di kelola pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk dan harga produk kelautan perikanan. Strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan PDRB sektor kelautan perikanan, meningkatkan produksi kelautan perikanan serta meningkatkan penerimaan devisa melalui pangsa pasar dalam dan luar negeri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mostafaeipour *et al.* (2011) menjelaskan antara lain sebagai berikut: 1) iklan, standar yang baik dan kemasan untuk ekspor; 2) membangun fasilitas pengolahan dan pendinginan oleh investor; 3) menghasilkan ikan salmon untuk ekspor dalam kemasan yang baik; 4) pemerintah mendukung untuk transportasi, pinjaman, dan subsidi.
 6. Meningkatkan sumber daya manusia terampil untuk melaksanakan diversifikasi produk kelautan dan perikanan. Strategi ini dapat dilakukan dengan upaya mengalokasikan sumber dana untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan nelayan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan dengan memanfaatkan teknologi kelautan perikanan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sundah *et al.* (2014) menyatakan strategi prioritas pengembangan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, adalah strategi pengembangan sumber daya manusia dengan kegiatan seperti pelatihan keterampilan untuk mendukung kepentingan dan permintaan dari nelayan tradisional termasuk tentang teknik memancing modern, kewirausahaan, dan pelatihan non perikanan lainnya.
 7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana untuk memanfaatkan kemajuan teknologi kelautan perikanan. Strategi ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan sumber dana yang memadai, meningkatkan sumber daya manusia kelautan perikanan baik aparatur maupun sumber daya manusia nelayan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayati *et al.* (2011) menyatakan peningkatan kualitas masyarakat nelayan, dalam konteks ini, adalah nelayan sebagai kepala rumah tangga, dan nelayan sebagai satu keluarga. Anak-anak nelayan diharapkan untuk menyelesaikan pendidikan kedua. Sehingga akses masa depan untuk perkembangan teknologi maritim, ekonomi perbaikan lebih mudah dilakukan. Hal ini sesuai pula dengan hasil penelitian Sundah *et al.* (2014) menyatakan strategi pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan melalui perbaikan infrastruktur nelayan dan pengelolaan lingkungan nelayan tradisional.
 8. Pemanfaatan teknologi kelautan dan perikanan dalam mengembangkan pariwisata bahari dan tourism serta meningkatkan investasi asing maupun dalam negeri. Strategi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pariwisata bahari dengan meningkatkan daya saing produk kelautan perikanan yang berbasis sumber daya manusia yang inovatif dan terampil. Hal ini sependapat dengan Sundah *et al.* (2014)



menyatakan strategi pengembangan pariwisata dengan kegiatan seperti membangun pariwisata terpadu dan mendukung nelayan tradisional.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, strategi pengembangan wilayah pesisir provinsi Bengkulu dapat dilakukan dengan menggunakan strategi agresif. Dimana strategi agresif salah satu strategi yang menggambarkan bahwa situasi yang sangat baik karena ada kekuatan yang dimanfaatkan untuk meraih peluang yang menguntungkan, untuk mengatasi berbagai kelemahan dan ancaman.

Berkenaan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan secara khusus beberapa hal penting sebagai berikut: Strategi pengembangan wilayah pesisir provinsi Bengkulu dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut secara optimal dapat dilakukan untuk memenuhi luasnya pangsa pasar produk kelautan perikanan di dalam dan luar negeri, menegakkan peraturan perundang undangan yang ada untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan di dalam negeri, percepatan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka penyediaan bahan baku produk olahan kelautan perikanan, memantapkan kelembagaan pemerintah yang permanen untuk memenuhi meningkatnya permintaan produk olahan kelautan perikanan, meningkatkan alokasi dana yang di kelola pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk dan harga produk kelautan perikanan, meningkatkan pembangunan Infrastruktur/sarana prasarana untuk memanfaatkan kemajuan teknologi kelautan perikanan serta pemanfaatan teknologi kelautan dan perikanan dalam mengembangkan pariwisata bahari dan tourism serta meningkatkan investasi asing maupun dalam negeri.

Saran

1. Dalam rangka pengembangan dan memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir secara optimal pemerintah berkewajiban untuk memenuhi luasnya pangsa pasar produk kelautan perikanan di dalam dan luar negeri, menegakkan peraturan perundang undangan yang ada untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan di dalam negeri, segera melakukan percepatan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka penyediaan bahan baku produk olahan kelautan perikanan, memantapkan kelembagaan pemerintah yang permanen untuk memenuhi meningkatnya permintaan produk olahan kelautan perikanan, meningkatkan alokasi dana yang di kelola pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk dan harga produk kelautan perikanan, meningkatkan sumber daya manusia terampil untuk melaksanakan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, meningkatkan pembangunan Infrastruktur/sarana prasarana untuk memanfaatkan kemajuan teknologi kelautan perikanan, memanfaatkan teknologi kelautan dan perikanan dalam mengembangkan pariwisata bahari dan tourism serta meningkatkan investasi asing maupun dalam negeri.
2. Dalam rangka melaksanakan poin satu (1) dan dua (2) tersebut di atas pemerintah harus secara konsisten dan berkelanjutan membuat kebijakan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten / kota dan mengimplementasikan program-program



nyata untuk pengembangan wilayah pesisir serta mengevaluasi program-program yang kurang optimal dan bermanfaat untuk pengembangan wilayah.

Daftar Pustaka

- Aheto, Denis W., *et al.* (2012). *Profitability of Small-Scale Fisheries in Elmina, Ghana, Sustainability*, 4, 2785-2794; Doi:10.3390/su4112785
- Alison, Edward H., *et al.* (2001) *The livelihoods approach and management of small-scale fisheries*, Pergamon Marine Policy 25 : 377–388
- Andrew, Neil L., *et al.* (2015). *Diagnosis and management of small-scale fisheries in developing countries*, Article in Fish and Fisheries Impact Factor: 8.76. Doi: 10.1111 / j.1467-2679.2007.00252.x Available from: Edward H Allison Retrieved
- Charles W. Lamb, dan Joseph F. Hair, dan Carl Mc Daniel. (2004). *Pemasaran*. Edisi Keempat. Penerbit: Salemba Empat : Jakarta.
- Darajati, Wahyuningsih. (2004). *Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*. Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP. Direktur Kelautan dan Perikanan, BAPPENAS.
- Hoagland, P., *et al.* (2013). *Supply –side Approaches to the Economic Valuation of Coastal and marine Habitat in the Red Sea*. Journal of King Saud University, vol 25, 217-278
- Jentoft, S., *et al.*, (2010). *Freedom and poverty in the fishery commons*, International Journal of the Commons Vol. 4, no 1 February 2010, pp. 345–366
- Kishor, N. Ratna,. (2014). *Empowerment Of Fishermen Through Microcredit*, International Journal Of Business Management and Allied Sciences (IJBMAS), KY Pulication, Vol.1.Issue.1
- Kementrian Kelautan Perikanan Republik Indonesia.(2014). *Laporan Produksi Sektor Perikanan*.
- Kementrian Kelautan Perikanan Republik Indonesia. (2015). *Rencana Strategis Kementrian Kelautan Perikanan 2015-2019*.
- Kusumastanto, (2004). *Kajian Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Terumbu Karang*. Pasca Sarjana Undip: Semarang.
- Laynurak, Yoseph M., (2008). *Model Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Serta Kelestarian Sumber daya Wilayah Pesisir Di Kabupaten BELU-NTT*. Disertasi Doktor Program Doktor Manajemen Sumber daya Pantai Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Olomola, Ade S., (1993). *The Traditional Approach Towards Sustainable Management of Common Property Fishery Resources in Nigeria*. MAST Journal, 6 (1/2): 92-109.
- Rangkuti Freddy, (2014). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT.Gramedia Pustaka Kompas: Jakarta
- Rini, Nindi Mega. (2013). *Transformasi Nelayan Menuju Taraf Kehidupan Yang Lebih Baik: Dampak Pariwisata, Kebijakan Taksi Mina Bahari dan Ekonomi*. [http://www.academia.edu/8443030/Jurnal Masyarakat Pesisir](http://www.academia.edu/8443030/Jurnal_Masyarakat_Pesisir)



- Schernewski, G., *et al.*, (2014). *Application and Evaluation of an Indicator Set To Measure and Promote Sustainable Development in Coastal Areas*. Ocean & Coastal Management by Elsevier Ltd. Volume 101, Part A, November, Pages 2–13
- Siar, Susana V., (2003). *Knowledge, Gender, and Resources in Small-Scale Fishing: The Case of Honda Bay, Palawan, Philippines* Environmental Management 31.5 (May): 569-80.
- Sobo, *et al.*,(2011). *Costal Livelihood in the United Republic Of Tanzania*, EcoAfrica, ASCLME project: Tanzania.
- Soesilo, I Nining.,(2002). *Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik, Buku I*. Universitas Indonesia.

